ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol.5, No.12, November 2026

Ketika Kepercayaan Terkikis: Korupsi, *Foreign Direct Investment*, Utang Pemerintah, dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam

Abiddah Rahmatusshalihah[1], R. Moh. Qudsi Fauzy[2]
[1,2]Universitas Airlangga Surabaya, Indonesia
E-mail: abiddahrahmatuss@gmail.com[1]

Article History:
Received: 29 Oktober 2026
Revised: 30 Oktober 2026
Accepted: 03 November 2026

Kata Kunci: *Korupsi; Investasi Asing Langsung; Utang Pemerintah; Pertumbuhan Ekonomi; ARDL; Ekonomi Islam.*

Abstrak**:** *Kepercayaan terhadap institusi merupakan salah satu fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkaitan erat dengan kualitas tata kelola, investasi asing, dan keberlanjutan fiskal. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan jangka pendek dan jangka panjang antara korupsi, foreign direct investment (FDI), utang pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia serta menginterpretasikan temuan empirisnya dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode Autoregressive Distributed Lag (ARDL) dan bounds testing berdasarkan data tahunan Indonesia periode 2002–2024. Korupsi diukur menggunakan Corruption Perceptions Index (CPI), FDI melalui arus masuk bersih terhadap produk domestik bruto (PDB), dan utang pemerintah melalui rasio utang terhadap PDB. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan jangka panjang antarvariabel. Peningkatan skor CPI, yang mencerminkan penurunan persepsi korupsi, justru berasosiasi negatif dengan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Temuan ini tetap konsisten setelah penggunaan indikator Control of Corruption dan pengendalian guncangan pandemi COVID-19. Sebaliknya, dalam jangka pendek, peningkatan skor CPI berhubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi pada tingkat signifikansi 10%. FDI tidak menunjukkan hubungan yang signifikan, sedangkan utang pemerintah memiliki hubungan negatif dan signifikan dalam jangka panjang pada model dasar, tetapi kehilangan signifikansinya setelah guncangan pandemi dikendalikan. Temuan ini memperlihatkan kompleksitas hubungan antara kualitas kelembagaan, pembiayaan eksternal, keberlanjutan fiskal, dan pertumbuhan ekonomi. Melalui perspektif dinamika pembangunan Ibnu Khaldun dan maqāṣid al-sharīʿah, penelitian ini menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu dievaluasi tidak hanya berdasarkan indikator makroekonomi, tetapi juga berdasarkan prinsip amānah, keadilan, dan kemaslahatan dalam tata kelola keuangan publik.*

PENDAHULUAN

Dalam satu pekan pada Oktober 2026, tiga peristiwa yang tampak tidak berhubungan memperlihatkan rapuhnya kepercayaan terhadap institusi Indonesia. Pertama, asap kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Sumatra menyeberang ke negara tetangga dan mendorong Indeks Standar Pencemar (PSI) 24 jam di Singapura ke kisaran tidak sehat, yaitu 121–185, pada 15 Oktober (Hassan, 2026). Seorang anggota parlemen Malaysia bahkan mendesak negara-negara ASEAN mengirim nota protes diplomatik kepada Indonesia dan memberikan tekanan finansial kepada perusahaan yang terbukti membakar lahan (Lainufar, 2026). Kedua, pada 13 Oktober Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan sehari kemudian menetapkan lima tersangka dalam dugaan konflik kepentingan dan suap pada pengadaan yang dibiayai dana siap pakai penanggulangan bencana, dengan nilai pengadaan sekitar Rp148 miliar pada 2024–2026 (Setyowati, 2026; Winduajie, 2026). Karena perkara ini masih dalam proses hukum, seluruh temuan tersebut berstatus dugaan. Ketiga, pada 15 Oktober MSCI membuka konsultasi untuk menurunkan klasifikasi pasar saham Indonesia dari *emerging market* menjadi *standalone market*; keesokan harinya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok 11,57 persen ke level 5.185,11, penurunan harian terdalam sejak 1998 (Paramahamsa, 2026; Muhamad, 2026).

Ketiga peristiwa tersebut berbeda sifatnya, tetapi memiliki benang merah yang sama: masing-masing menandakan melemahnya kemampuan negara dalam menepati janjinya, baik untuk menjaga udara negara tetangga, mengamankan dana yang seharusnya menyelamatkan nyawa, maupun menyediakan pasar modal yang transparan dan kredibel. Teori ekonomi telah lama mengakui bahwa pertumbuhan tidak hanya bergantung pada jumlah modal, tetapi juga pada institusi yang mengatur penggunaannya (Barro & Sala-i-Martin, 2004). Investor hanya mau menanamkan modal apabila percaya modalnya akan dilindungi, dan wajib pajak hanya menerima pinjaman pemerintah apabila percaya pinjaman tersebut akan digunakan secara produktif (Gründler & Potrafke, 2019; Onafowora & Owoye, 2019).

Indikator makroekonomi menunjukkan gambaran yang sejalan. Skor *Corruption Perceptions Index* (CPI) Indonesia turun dari 37 menjadi 34 pada 2025, dan peringkatnya merosot dari 99 ke 109 dari 180 negara (Transparency International Indonesia, 2026). Realisasi penanaman modal asing pada 2025 hampir tidak tumbuh (Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, 2026). Rasio utang pemerintah mencapai 40,46 persen terhadap PDB pada akhir 2025, tertinggi dalam empat tahun terakhir (Kementerian Keuangan, 2026), dan pembayaran bunga utang sebesar Rp444,5 triliun hingga September 2026 telah melampaui defisit anggaran pada periode yang sama (Kontan, 2026). Sementara itu, pertumbuhan ekonomi tertahan di sekitar 5 persen, di bawah capaian 6 persen pada 2010–2012 (World Bank, 2026).

Pemikiran ekonomi Islam menawarkan lensa yang sangat relevan untuk memahami fenomena tersebut. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa kemakmuran (*'umran*) bertumpu pada keadilan penguasa dan rasa aman rakyat atas hartanya, serta bahwa kezaliman dan pejabat yang memperkaya diri akan melemahkan semangat berproduksi hingga akhirnya meruntuhkan peradaban (Ibnu Khaldun, 1967). Chapra (2000, 2008) memformalkan gagasan ini ke dalam model dinamika di mana pemerintah, syariah, masyarakat, harta, pembangunan, dan keadilan saling memperkuat, serta pembangunan diukur dari terwujudnya *maqashid syariah*. Dari sudut pandang ini, korupsi, utang yang tidak produktif, dan hilangnya kepercayaan investor bukan masalah yang terpisah, melainkan gejala dari defisit *amanah* dan *'adl* yang sama.

Meskipun memiliki keterkaitan konseptual, penelitian empiris umumnya mengkaji korupsi, utang, dan FDI secara terpisah atau berpasangan dengan data panel lintas negara (Asteriou et al.,

2021; Gründler & Potrafke, 2019; Ibrahim, 2020; Onafowora & Owoye, 2019). Ria et al. (2026) meneliti FDI dan korupsi di ASEAN dalam perspektif Islam, tetapi tidak memasukkan utang pemerintah. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menjawab pertanyaan: bagaimana korupsi, FDI, dan utang pemerintah secara bersama-sama memengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang, serta apa implikasinya bagi pemulihan kepercayaan kelembagaan dalam perspektif ekonomi Islam?

Penelitian ini memberikan tiga kontribusi. Pertama, penelitian ini membingkai ketiga variabel sebagai dimensi kepercayaan kelembagaan yang saling terkait dan menghubungkan bukti jangka panjang 2002–2024 dengan guncangan kepercayaan pada 2026. Kedua, penelitian ini menerapkan pendekatan ARDL *bounds testing* untuk memisahkan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang pada satu negara dengan derajat integrasi campuran, sekaligus menguji ketahanan hasil terhadap ukuran tata kelola alternatif dan guncangan pandemi 2020. Ketiga, penelitian ini menafsirkan hasil melalui model dinamika Ibnu Khaldun dan *maqashid syariah*, sehingga menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tidak hanya menyangkut laju pertumbuhan, tetapi juga kualitas dan legitimasinya. Bagian selanjutnya menguraikan tinjauan pustaka, data dan metode, hasil, pembahasan dalam kaitannya dengan peristiwa terkini dan ekonomi Islam, serta kesimpulan dan implikasi kebijakan.

LANDASAN TEORI

Institusi, Kepercayaan, dan Pertumbuhan

Dalam kerangka neoklasik Solow, output tumbuh melalui akumulasi modal, tenaga kerja, dan teknologi. Barro dan Sala-i-Martin (2004) menekankan bahwa selama masa transisi panjang menuju kondisi mapan, kebijakan fiskal, pendidikan, dan penegakan hukum menentukan seberapa cepat suatu perekonomian tumbuh, sedangkan teori pertumbuhan endogen menyoroti modal manusia, limpahan pengetahuan, dan difusi teknologi melalui FDI. Kedua aliran ini menunjukkan bahwa institusi, beserta kepercayaan yang dihasilkannya, menentukan produktivitas modal. Ketika kepercayaan lemah, modal ditahan, dialokasikan secara keliru, atau dialihkan ke perburuan rente.

Korupsi: Pasir atau Pelumas?

Korupsi, yaitu penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi, menaikkan biaya transaksi dan mendistorsi alokasi sumber daya (Rose-Ackerman & Palifka, 2016). Hipotesis *sand the wheels* menyatakan bahwa korupsi menghambat produksi yang efisien dan inovasi; Gründler dan Potrafke (2019) menemukan bahwa kenaikan korupsi sebesar satu standar deviasi menurunkan PDB riil per kapita sekitar 17 persen dalam jangka panjang, terutama melalui penurunan FDI dan kenaikan inflasi. Teori *rent-seeking* menambahkan bahwa korupsi bekerja seperti pajak atas investasi (Mauro, 1995) dan membelokkan belanja publik ke proyek yang menawarkan komisi alih-alih manfaat sosial (Rose-Ackerman & Palifka, 2016). Ibrahim (2020) juga menunjukkan bahwa korupsi memperbesar dampak negatif utang publik terhadap pertumbuhan di negara berkembang.

Pandangan tandingan, *grease the wheels*, berargumen bahwa di negara dengan birokrasi yang kaku dan institusi yang tidak efektif, korupsi dapat mempercepat transaksi ekonomi (Méon & Weill, 2010). Bukti empiris untuk negara berkembang Asia belum seragam: Ria et al. (2026) menemukan bahwa skor CPI yang lebih tinggi, yang menandakan persepsi korupsi lebih rendah, justru berkaitan dengan pertumbuhan yang lebih rendah di enam negara ASEAN. Karena prediksi teori saling bertentangan, hipotesis pertama dirumuskan tanpa arah tertentu:

H1: Korupsi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Foreign Direct Investment dan Saluran Kepercayaan

Two-gap model memandang FDI sebagai sarana menutup kesenjangan tabungan domestik dan devisa (Todaro & Smith, 2020), sedangkan teori pertumbuhan endogen menekankan perannya dalam mentransfer modal, lisensi, dan keahlian manajerial (Barro & Sala-i-Martin, 2004). Namun, manfaat tersebut bergantung pada tata kelola dan kepastian hukum negara penerima (Todaro & Smith, 2020). Onafowora dan Owoye (2019) menemukan pengaruh FDI yang positif dan signifikan di empat dari lima negara Karibia, tetapi tidak signifikan di Bahamas, dan menegaskan bahwa institusi menentukan besarnya manfaat FDI. Karena FDI merupakan komitmen jangka panjang, FDI sangat sensitif terhadap tingkat kepercayaan pada negara penerima.

H2: *Foreign direct investment* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Utang Pemerintah dan Kredibilitas Fiskal

Hipotesis *debt overhang* menyatakan bahwa utang yang tinggi menimbulkan ekspektasi pajak di masa depan sehingga melemahkan investasi (Krugman, 1988). Efek *crowding out* dan *liquidity constraint* muncul ketika pinjaman pemerintah menyerap tabungan domestik dan pembayaran utang menggeser belanja produktif (Mhlaba & Phiri, 2019). Reinhart dan Rogoff (2010) mengaitkan utang di atas 90 persen PDB dengan pertumbuhan yang jauh lebih rendah, tetapi Asteriou et al. (2021) menemukan dampak negatif di 14 negara Asia pada rasio yang jauh lebih rendah, dan Law et al. (2021) memperkirakan ambang batas sekitar 51,65 persen bagi negara berkembang. Temuan ini menunjukkan bahwa kredibilitas dan produktivitas pinjaman sama pentingnya dengan besarnya utang.

H3: Utang pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kerangka Kepercayaan dalam Islam: *Amanah*, *'Adl*, dan *Maqashid Syariah*

Dalam pembacaan Chapra (2000) atas Ibnu Khaldun, pembangunan merupakan hasil interaksi antara pemerintah (*al-mulk*), syariah, masyarakat (*an-nas*), harta (*al-mal*), pembangunan (*al-'imarah*), dan keadilan (*al-'adl*). Kerusakan pada salah satu unsur, terutama ketidakadilan penguasa, memicu kemerosotan yang bersifat kumulatif. Dalam hukum Islam, korupsi berbentuk *ghulul* (penggelapan harta publik yang diamanahkan) dan *risywah* (suap), yang keduanya dilarang Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah 2:188; QS. Ali 'Imran 3:161). Utang publik berbunga bertentangan dengan larangan riba (QS. Al-Baqarah 2:275); Al-Saati (1996) menunjukkan bahwa utang tersebut menurunkan output dan kesejahteraan, serta menawarkan pembiayaan *qirad* atau *mudarabah* publik yang imbal hasilnya mengikuti kinerja riil proyek. Investasi dianjurkan sebagai bagian dari amanah memakmurkan bumi (QS. Hud 11:61), dengan syarat bebas dari riba, *gharar*, dan *maysir* serta diarahkan ke sektor produktif yang halal (Ria et al., 2026). Secara keseluruhan, prinsip-prinsip ini memaknai kepercayaan sebagai infrastruktur moral dan kelembagaan yang bertujuan menjaga harta (*hifzh al-mal*), jiwa (*hifzh an-nafs*), dan keturunan (*hifzh an-nasl*) (Chapra, 2008).

METODE PENELITIAN

Data

Penelitian ini menggunakan data runtun waktu tahunan Indonesia periode 2002–2024 (23 observasi). Variabel, cara pengukuran, dan sumber datanya dirangkum pada Tabel 1.

Tabel 1. Variabel, pengukuran, dan sumber data

Variabel	Simbol	Pengukuran	Satuan	Sumber
Pertumbuhan ekonomi	GDP	Pertumbuhan PDB riil tahunan	%	*World Bank, World Development Indicators*
Korupsi	CPI	Skor *Corruption Perceptions Index*; 0 = sangat korup, 100 = sangat bersih	Skor 0–100	*Transparency International*
Foreign direct investment	FDI	*FDI, net inflows*	% PDB	*World Bank, World Development Indicators*
Utang pemerintah	DEBT	Rasio utang pemerintah terhadap PDB	% PDB	*International Monetary Fund*

Karena skor CPI yang lebih tinggi menandakan persepsi korupsi yang lebih rendah, koefisien CPI yang negatif berarti membaiknya persepsi integritas berkaitan dengan pertumbuhan yang lebih rendah, dan sebaliknya. Ketentuan ini diterapkan secara konsisten dalam menafsirkan hasil.

Pendekatan ARDL *Bounds Testing*

Variabel penelitian diperkirakan memiliki derajat integrasi yang berbeda, dan jumlah sampelnya kecil. Pendekatan ARDL *bounds testing* dari Pesaran et al. (2001) sesuai untuk kondisi tersebut, karena dapat digunakan untuk regresor yang I(0), I(1), atau saling terkointegrasi, berkinerja baik pada sampel kecil, dan menghasilkan estimasi jangka pendek dan jangka panjang dalam satu kerangka. Bentuk *conditional error correction*-nya adalah:

$$\Delta \mathrm{GDP(t)} = \alpha 0 + \sum \beta 1\mathrm{i}\Delta \mathrm{GDP(t-i)} + \sum \beta 2\mathrm{i}\Delta \mathrm{CPI(t-i)} + \sum \beta 3\mathrm{i}\Delta \mathrm{FDI(t-i)} + \sum \beta 4\mathrm{i}\Delta \mathrm{DEBT(t-i)} + \lambda 1\mathrm{GDP(t-1)} + \lambda 2\mathrm{CPI(t-1)} + \lambda 3\mathrm{FDI(t-1)} + \lambda 4\mathrm{DEBT(t-1)} + \varepsilon(\mathrm{t})$$

Hipotesis nol tidak adanya hubungan jangka panjang, H0: $\lambda 1 = \lambda 2 = \lambda 3 = \lambda 4 = 0$, diuji dengan F-statistik yang dibandingkan dengan nilai kritis asimtotik Pesaran et al. (2001) dan nilai kritis sampel kecil Narayan (2005). Apabila kointegrasi terkonfirmasi, hubungan jangka panjangnya adalah:

$$\mathrm{GDP(t)} = \theta 0 + \theta 1\ \mathrm{CPI(t)} + \theta 2\mathrm{FDI(t)} + \theta 3\mathrm{DEBT(t)}$$

sedangkan dinamika jangka pendek diestimasi melalui *error correction model*:

$$\Delta \mathrm{GDP(t)} = \alpha 0 + \sum \beta 1\mathrm{i}\Delta \mathrm{GDP(t\text{-}1)} + \sum \beta 2\mathrm{i}\Delta \mathrm{CPI(t\text{-}1)} + \sum \beta 3\mathrm{i}\Delta \mathrm{FDI(t\text{-}1)} + \sum \beta 4\mathrm{i}\Delta \mathrm{DEBT(t\text{-}1)} + \gamma \mathrm{ECT(t\text{-}1)} + \varepsilon(\mathrm{t})$$

di mana ECT adalah *error correction term* dan γ mengukur kecepatan penyesuaian menuju keseimbangan jangka panjang, yang seharusnya bernilai negatif dan signifikan.

Prosedur Estimasi

Analisis dilakukan dalam beberapa tahap. Pertama, uji *Augmented Dickey-Fuller* (ADF) digunakan untuk memastikan tidak ada variabel yang terintegrasi pada derajat dua (Gujarati & Porter, 2009). Kedua, struktur lag optimum dipilih menggunakan *Akaike Information Criterion* (AIC). Ketiga, dilakukan uji *bounds*. Keempat, koefisien jangka panjang dan jangka pendek diestimasi. Kelima, model diuji dengan uji diagnostik, yaitu uji normalitas Jarque-Bera, uji

autokorelasi *Breusch-Godfrey LM*, uji heteroskedastisitas *Breusch-Pagan-Godfrey*, serta uji stabilitas CUSUM dan CUSUM of Squares (Brown et al., 1975). Terakhir, ketahanan hasil diuji dengan menambahkan *dummy* impuls untuk guncangan pandemi 2020 dan mengganti CPI dengan indikator *Control of Corruption* dari WGI (Kaufmann et al., 2011). Seluruh estimasi dilakukan pada taraf signifikansi 5 persen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 2. Statistik deskriptif, 2002–2024 (N = 23)

Variabel	Mean	Median	Maks.	Min.	Std. Dev.
GDP (%)	4,94	5,05	6,35	−2,07	1,65
CPI (skor)	30,65	32,00	40,00	19,00	6,81
FDI (% PDB)	1,69	1,81	2,92	−0,25	0,82
DEBT (% PDB)	35,25	30,56	62,34	22,96	10,65

Sumber: Data sekunder yang diolah

Pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata 4,94 persen, tertinggi 6,35 persen pada 2007 dan terkontraksi 2,07 persen pada 2020 saat pandemi COVID-19. Skor CPI meningkat hampir dua kali lipat dari 19 pada 2002 menjadi 40 pada 2019, tetapi tidak pernah melampaui 40, sehingga Indonesia tetap tergolong negara dengan persepsi korupsi tinggi. Arus masuk FDI rata-rata hanya 1,69 persen PDB dan berfluktuasi, mulai dari arus keluar bersih pada 2003 hingga 2,92 persen PDB pada 2005. Rasio utang turun dari 62,34 persen pada 2002 ke titik terendah 22,96 persen pada 2012, lalu naik kembali hingga sekitar 40 persen setelah pandemi.

Uji Akar Unit dan Kointegrasi

Hasil uji ADF pada Tabel 3 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan rasio utang stasioner pada tingkat *level* atau I(0), sedangkan CPI dan FDI stasioner setelah diferensiasi pertama atau I(1). Tidak ada variabel yang terintegrasi pada I(2), sehingga pendekatan ARDL dapat digunakan.

Tabel 3. Uji Akar Unit ADF

Variabel	Prob. (*level*)	Prob. (*first difference*)	Derajat integrasi
GDP	[isi]	–	I(0)
CPI	[isi]	[isi]	I(1)
FDI	[isi]	[isi]	I(1)
DEBT	[isi]	–	I(0)

Sumber: Estimasi penulis dengan EViews

Berdasarkan AIC, spesifikasi yang terpilih adalah ARDL (4, 1, 2, 0) dengan 19 observasi efektif (2006–2024). F-statistik uji *bounds* sebesar 5,118 melampaui batas atas I(1) asimtotik pada taraf 1 persen (4,66) dan batas atas I(1) sampel kecil Narayan (2005) pada taraf 5 persen (4,306), sehingga terdapat hubungan jangka panjang antarvariabel (Tabel 4).

Tabel 4. Uji ARDL *Bounds*

Statistik	Nilai	Taraf	I(0)	I(1)

F-statistik	5,118	5% (asimtotik)	2,79	3,67
k	3	1% (asimtotik)	3,65	4,66
n efektif	19	5% (sampel kecil, n = 30)	3,272	4,306

Sumber: Estimasi penulis dengan EViews

Estimasi Jangka Panjang dan Jangka Pendek

Tabel 5. Hasil estimasi ARDL (4, 1, 2, 0)

Variabel	Koefisien	t-statistik	Prob.
Jangka panjang			
CPI	−0,0841	−3,366	0,010***
FDI	0,0823	0,222	0,830
DEBT	−0,0917	−3,219	0,012**
Konstanta	10,2981	7,770	0,000***
Jangka pendek (ECM)			
ΔGDP(t−1)	1,3172	4,187	0,003***
ΔGDP(t−2)	0,5926	2,431	0,041**
ΔGDP(t−3)	0,2840	1,646	0,138
ΔCPI	0,3289	2,133	0,065*
ΔFDI	0,1887	0,505	0,627
ΔFDI(t−1)	−0,6558	−1,957	0,086*
ECT(t−1)	−2,6234	−6,196	0,000***
R^2 / Adjusted R^2	0,858 / 0,788		

*Keterangan: ***, **, dan * signifikan pada taraf 1%, 5%, dan 10%.*
Sumber: Estimasi penulis dengan EViews.

Dalam jangka panjang, korupsi yang diukur dengan skor CPI berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (koefisien −0,0841; p = 0,010). Karena skor CPI yang lebih tinggi berarti korupsi lebih rendah, setiap kenaikan skor CPI sebesar satu poin berkaitan dengan penurunan pertumbuhan sebesar 0,084 poin persen. Dengan demikian, H1 diterima. Rasio utang berpengaruh negatif dan signifikan dalam jangka panjang (−0,0917), sehingga kenaikan rasio utang sebesar satu poin persen PDB berkaitan dengan penurunan pertumbuhan sebesar 0,092 poin persen. Hasil ini mendukung H3 pada model dasar, meskipun sensitif terhadap guncangan 2020 (subbab 4.5). Sementara itu, FDI berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (koefisien 0,0823; p = 0,830), sehingga H2 ditolak.

Dalam jangka pendek, perubahan CPI berpengaruh positif dan signifikan pada taraf 10 persen, yang menunjukkan bahwa perbaikan persepsi integritas mendorong pertumbuhan dalam waktu dekat. FDI tahun berjalan tidak signifikan, sedangkan FDI tahun sebelumnya berpengaruh negatif dan hanya signifikan pada taraf 10 persen. Utang tidak muncul dalam persamaan jangka pendek karena lag optimumnya nol. *Error correction term* bernilai negatif dan sangat signifikan (−2,6234), yang mengonfirmasi adanya penyesuaian menuju keseimbangan. Namun, besarnya yang lebih kecil dari −2 menunjukkan jalur penyesuaian yang berosilasi, sehingga perlu ditafsirkan dengan hati-hati mengingat sampel yang kecil.

Uji Diagnostik

Tabel 6. Uji diagnostik

Uji	Statistik	Prob.	Kesimpulan
Normalitas (Jarque-Bera)	1,107	0,575	Residual normal
Autokorelasi (Breusch-Godfrey LM, Obs∗R^2)	7,432	0,059	Tidak ada autokorelasi
Heteroskedastisitas (Breusch-Pagan-Godfrey, Obs∗R^2)	11,446	0,324	Homoskedastis
Stabilitas (CUSUM dan CUSUM of Squares)	–	–	Stabil pada taraf 5%

Sumber: Estimasi penulis dengan EViews

Seluruh probabilitas uji diagnostik lebih besar dari 0,05, dan grafik CUSUM maupun CUSUM of Squares berada di dalam batas kritis 5 persen, sehingga model dinyatakan terspesifikasi dengan baik dan parameternya stabil selama periode penelitian.

Uji Robustness

Ada dua hal yang dapat memengaruhi hasil model dasar. Pertama, CPI mengukur persepsi dan metodologinya berubah pada 2012. Kedua, tahun 2020 menggabungkan kontraksi pertumbuhan yang tajam dengan lonjakan utang publik akibat pandemi COVID-19, yang dapat memengaruhi estimasi hubungan utang dan pertumbuhan. Karena itu, model diestimasi ulang dengan (i) menambahkan *dummy* impuls untuk 2020 (COVID = 1 pada 2020 dan 0 pada tahun lainnya), (ii) mengganti CPI dengan peringkat persentil *Control of Corruption* dari *Worldwide Governance Indicators* (WGI) Bank Dunia (Kaufmann et al., 2011), yang nilainya juga semakin tinggi bila korupsi semakin rendah, dan (iii) menggabungkan keduanya, baik dengan struktur lag model dasar maupun lag yang dipilih berdasarkan AIC. Hasilnya disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Uji Robustness: Koefisien Jangka Panjang dan Diagnostik

	(1) CPI dasar	(2) CPI + COVID	(3) WGI	(4) WGI, lag AIC	(5) WGI + COVID, lag AIC
Ordo ARDL	(4, 1, 2, 0)	(4, 1, 2, 0)	(4, 1, 2, 0)	(4, 2, 1, 0)	(2, 0, 1, 0)
Indeks korupsi	−0,084***	−0,074**	−0,098**	−0,095***	−0,123**
FDI	0,085	0,045	−0,493	−0,106	−0,366
DEBT	−0,091**	−0,023	−0,119***	−0,110***	−0,008
Dummy COVID	–	−7,087***	–	–	−6,630***
ECT(t−1)	−2,621***	−0,932**	−3,411***	−3,677***	−0,933***
F *bounds*	5,115	10,587	4,764	14,183	25,064
Breusch-Godfrey LM(3), p	0,060	0,011	0,004	0,017	0,130
Breusch-Pagan-Godfrey, p	0,322	0,567	0,105	0,483	0,339
Jarque-Bera, p	0,571	0,132	0,945	0,867	0,645

*Keterangan: ***, **, dan * signifikan pada taraf 1%, 5%, dan 10%.*
Sumber: Estimasi penulis dengan EViews

Indeks korupsi adalah CPI pada kolom (1)–(2) dan WGI *Control of Corruption* pada kolom (3)–(5); pada keduanya, nilai yang lebih tinggi berarti korupsi lebih rendah. Seluruh F *bounds* melampaui batas atas sampel kecil 5% sebesar 4,306 (Narayan, 2005). Kolom (1) mereplikasi estimasi dasar pada Tabel 5 dengan selisih pembulatan

Terdapat tiga pola. Pertama, pengaruh korupsi yang negatif dan signifikan dalam jangka panjang bersifat robust: koefisiennya tetap negatif dan signifikan ketika guncangan 2020 dikendalikan dan ketika CPI diganti dengan ukuran WGI. Kedua, FDI tetap tidak berpengaruh signifikan di seluruh spesifikasi, meskipun tanda koefisiennya positif pada model dasar. Ketiga, pengaruh negatif utang pemerintah tidak robust terhadap guncangan pandemi. Tanpa *dummy* 2020, utang berpengaruh negatif dan signifikan dengan kedua ukuran korupsi, tetapi setelah *dummy* dimasukkan, koefisien utang menjadi kecil dan tidak signifikan, sedangkan *dummy* itu sendiri besar dan sangat signifikan. Pandemi secara bersamaan menekan pertumbuhan dan menaikkan rasio

utang, sehingga koefisien utang pada model dasar sebagian mencerminkan guncangan bersama tersebut.

Model dengan *dummy* COVID juga menghasilkan koefisien ECT dalam rentang lazim antara −1 dan 0, berbeda dengan penyesuaian yang berosilasi pada model dasar. Kolom (5), yang menggabungkan ukuran WGI, *dummy*, dan lag pilihan AIC, merupakan satu-satunya spesifikasi yang lolos seluruh uji diagnostik pada taraf 5 persen, termasuk autokorelasi, sehingga menjadi spesifikasi robustness yang diutamakan. Kolom (2)–(4) masih menunjukkan autokorelasi residual, sehingga lebih tepat dibaca sebagai uji sensitivitas daripada model akhir.

Pembahasan

Periode estimasi berakhir pada 2024, sehingga penelitian ini tidak dapat mengukur dampak peristiwa Oktober 2026. Peristiwa-peristiwa tersebut digunakan sebagai ilustrasi terkini dari mekanisme yang ditangkap oleh estimasi jangka panjang.

1. Paradoks Integritas

Koefisien CPI jangka panjang yang negatif menunjukkan bahwa membaiknya persepsi integritas Indonesia pada 2002–2019 tidak diterjemahkan menjadi pertumbuhan jangka panjang yang lebih cepat. Hasil ini sejalan dengan temuan Ria et al. (2026) di ASEAN dan konsisten dengan pola *grease the wheels* yang diuraikan Méon dan Weill (2010). Sebaliknya, koefisien jangka pendek bernilai positif, sejalan dengan pandangan *sand the wheels* bahwa tata kelola yang lebih bersih memperlancar kegiatan ekonomi dalam waktu dekat (Gründler & Potrafke, 2019; Ibrahim, 2020). Kombinasi ini kami tafsirkan sebagai paradoks integritas, bukan sebagai bukti bahwa korupsi bermanfaat. Terdapat tiga penjelasan yang masuk akal. Pertama, kenaikan skor CPI bertepatan dengan berakhirnya *boom* komoditas, sehingga hubungan negatif tersebut sebagian mencerminkan dua tren yang berlawanan arah. Kedua, penegakan hukum antikorupsi yang lebih kuat dapat membuat pejabat lebih berhati-hati dalam menyetujui proyek dan mencairkan anggaran selama masa transisi. Ketiga, dengan skor yang tidak pernah melampaui 40, korupsi masih mengakar, dan reformasi parsial belum cukup untuk mengubah perilaku ekonomi, sebagaimana diprediksi oleh konsep perangkap korupsi dari Rose-Ackerman dan Palifka (2016).

Kasus dugaan korupsi di BNPB menggambarkan mengapa paradoks ini tidak boleh dibaca sebagai toleransi terhadap korupsi. Ketika dana yang dialokasikan untuk keadaan darurat bencana diduga diselewengkan di tengah musim kebakaran dan banjir, kerugiannya tidak hanya diukur dalam rupiah, tetapi juga dalam keselamatan publik dan kredibilitas negara. Dalam perspektif Islam, perbuatan tersebut termasuk *ghulul* dan *risywah* yang dilarang dalam QS. Ali 'Imran 3:161 dan QS. Al-Baqarah 2:188. Ibnu Khaldun (1967) memperingatkan bahwa ketidakadilan pejabat melemahkan semangat berproduksi dan pada akhirnya membawa kemerosotan, dan Chapra (2008) akan menggolongkan penyelewengan dana darurat sebagai pelanggaran terhadap *hifzh al-mal* sekaligus *hifzh an-nafs*. Pertumbuhan yang berjalan berdampingan dengan korupsi tidak memiliki *barakah* yang dijanjikan bagi masyarakat yang beriman dan bertakwa (QS. Al-A'raf 7:96).

2. Mengapa FDI Belum Mendorong Pertumbuhan: Saluran Kepercayaan

Tidak signifikannya FDI menunjukkan bahwa modal asing belum menjadi penggerak pertumbuhan Indonesia yang dapat diandalkan. Meskipun tanda positifnya sejalan dengan *two-gap model* dan teori pertumbuhan endogen, manfaatnya bergantung pada institusi (Barro & Sala-i-Martin, 2004; Todaro & Smith, 2020), sebagaimana kasus Bahamas dalam Onafowora dan Owoye (2019) serta temuan Gründler dan Potrafke (2019) bahwa korupsi menurunkan FDI. Tiga karakteristik kasus Indonesia memperkuat tafsiran ini: FDI relatif kecil dibandingkan perekonomian, rata-rata 1,69 persen PDB; nilainya berfluktuasi; dan realisasi investasi asing

stagnan pada 2025.

Peristiwa Oktober 2026 memperlihatkan betapa cepat kepercayaan dapat menguap. Meskipun usulan MSCI berkaitan dengan investasi portofolio dan bukan investasi langsung, kejatuhan indeks saham yang mencetak rekor mencerminkan sensitivitas yang sama dari modal asing terhadap persepsi transparansi dan kredibilitas. Kabut asap lintas batas mengirimkan sinyal serupa: kebakaran berulang yang tampak tidak mampu dikendalikan negara menimbulkan keraguan atas kapasitas regulasi, baik di mata negara tetangga maupun calon investor. Pernyataan Ibnu Khaldun bahwa orang hanya mau berinvestasi apabila merasa aman atas hartanya dan percaya pada keadilan penguasa (Ibnu Khaldun, 1967) menggambarkan mekanisme ini dengan tepat. Perintah Al-Qur'an agar harta tidak hanya beredar di antara orang kaya (QS. Al-Hasyr 59:7) menambahkan kriteria distributif: FDI baru berkontribusi pada kemaslahatan apabila terhubung dengan produsen domestik dan menciptakan manfaat yang luas (Chapra, 2000; Ria et al., 2026).

3. Utang di Bawah Batas Aman, Tetap Menekan?

Pada spesifikasi dasar, pengaruh negatif utang dalam jangka panjang mendukung hipotesis *debt overhang* (Krugman, 1988) serta saluran *crowding out* dan *liquidity constraint* (Mhlaba & Phiri, 2019), sejalan dengan Asteriou et al. (2021). Pengaruh tersebut muncul meskipun rasio utang rata-rata hanya 35,25 persen PDB, jauh di bawah batas legal 60 persen, ambang 51,65 persen bagi negara berkembang menurut Law et al. (2021), dan ambang 90 persen menurut Reinhart dan Rogoff (2010). Hal ini menunjukkan bahwa produktivitas utang lebih penting daripada besarnya. Fakta bahwa pembayaran bunga pada 2026 melampaui defisit anggaran (Kontan, 2026) menunjukkan bahwa sebagian pinjaman baru digunakan untuk membiayai kewajiban lama alih-alih menambah kapasitas produksi. Dikombinasikan dengan temuan Ibrahim (2020) bahwa korupsi memperbesar dampak buruk utang, hal ini mengarah pada masalah kepercayaan fiskal, bukan semata masalah solvabilitas.

Namun, uji robustness menuntut kehati-hatian. Setelah guncangan pandemi 2020 dikendalikan, koefisien utang jangka panjang menjadi kecil dan tidak signifikan (Tabel 7). Pandemi memaksa pemerintah berutang dalam jumlah besar ketika output terkontraksi, sehingga sebagian hubungan pada model dasar mencerminkan guncangan bersama, bukan pengaruh kausal dari akumulasi utang. Ini tidak berarti utang tidak berbahaya: dengan hanya 19 observasi efektif, data belum mampu memisahkan pengaruh utang yang moderat dari dampak pandemi secara andal, dan tekanan fiskal yang diuraikan di atas tetap nyata. Klaim yang didukung bukti lebih sempit, yaitu bahwa kualitas dan penggunaan utang, terutama porsi yang semakin besar untuk membayar bunga, perlu mendapat perhatian kebijakan yang lebih besar daripada rasio utang semata.

Ekonomi Islam menawarkan diagnosis sekaligus solusi. Utang berbunga bertentangan dengan larangan riba (QS. Al-Baqarah 2:275), dan penggunaan dana pinjaman secara tidak produktif termasuk pemborosan yang dilarang (QS. Al-Isra' 17:27). Al-Saati (1996) menunjukkan bahwa *qirad* publik, yang imbal hasilnya bergantung pada kinerja riil proyek yang dibiayai, menghindarkan beban pajak masa depan yang ditimbulkan oleh utang berbunga. Sukuk negara berbasis proyek, yang telah diterbitkan Indonesia, merupakan langkah praktis ke arah tersebut, selama dananya dikaitkan dengan aset produktif yang dapat diverifikasi. Pergeseran ini akan menjaga *hifzh al-mal* dan *hifzh an-nasl* dengan mencegah beban yang tidak produktif diwariskan kepada generasi mendatang (Chapra, 2008).

4. Sintesis: Siklus Kepercayaan Ala Ibnu Khaldun

Jika dibaca bersama, hasil penelitian ini menggambarkan siklus yang konsisten dengan model dinamika Ibnu Khaldun. Integritas yang lemah menurunkan efisiensi belanja publik dan menghalangi modal jangka panjang; modal yang tertahan mendorong ketergantungan yang lebih

besar pada pinjaman; dan beban bunga yang meningkat mempersempit ruang fiskal serta semakin mengikis kredibilitas. Peristiwa Oktober 2026 memperlihatkan bagaimana siklus semacam ini dapat terlihat oleh negara tetangga, investor, dan warga secara bersamaan. Memutus siklus tersebut menuntut pemulihan *amanah* dan *'adl* sebagai fondasi kelembagaan pertumbuhan, bukan sekadar menaikkan angka pertumbuhan.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengkaji korupsi, FDI, dan utang pemerintah sebagai dimensi kepercayaan kelembagaan yang saling terkait serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 2002–2024. Uji ARDL *bounds* mengonfirmasi adanya hubungan jangka panjang. Perbaikan persepsi integritas mendorong pertumbuhan dalam jangka pendek, tetapi belum diikuti pertumbuhan jangka panjang yang lebih cepat; pola ini robust terhadap ukuran tata kelola alternatif dan guncangan pandemi. FDI tidak berpengaruh signifikan dalam semua spesifikasi. Pengaruh negatif utang pemerintah dalam jangka panjang pada model dasar tidak bertahan setelah guncangan 2020 dikendalikan, yang menunjukkan bahwa pandemi, bukan akumulasi utang itu sendiri, menjadi pendorong utama hubungan utang dan pertumbuhan dalam sampel ini. Guncangan kepercayaan pada Oktober 2026, yaitu kabut asap lintas batas, dugaan korupsi dana darurat bencana, dan ancaman penurunan klasifikasi pasar, memperlihatkan bagaimana kelemahan-kelemahan ini dapat muncul secara bersamaan.

Terdapat tiga implikasi kebijakan. Pertama, upaya pemberantasan korupsi perlu disertai penyederhanaan birokrasi dan pemulihan independensi lembaga antikorupsi, agar perbaikan integritas diterjemahkan menjadi pelayanan publik yang lebih cepat, bukan lebih lambat; dana darurat khususnya membutuhkan transparansi secara *real-time*. Kedua, pengelolaan utang perlu mengutamakan belanja produktif, mengendalikan beban bunga, dan memperluas sukuk berbasis proyek serta instrumen bagi hasil yang mengaitkan pembiayaan dengan aset yang dapat diverifikasi. Ketiga, menarik FDI yang mendorong pertumbuhan menuntut penegakan aturan lingkungan dan pasar yang kredibel, termasuk pencegahan kebakaran dan transparansi pasar modal, karena investor asing membaca hal-hal tersebut sebagai sinyal kapasitas negara. Dalam bahasa ekonomi Islam, langkah-langkah ini memulihkan *amanah* dan *'adl* serta melayani tujuan *maqashid syariah*.

Penelitian ini memiliki keterbatasan. Jumlah sampel kecil, dengan 19 observasi efektif, dan koefisien ECT di bawah −2 pada model dasar perlu ditafsirkan dengan hati-hati. CPI mengukur persepsi dan mengalami revisi metodologi pada 2012. Beberapa spesifikasi robustness menunjukkan autokorelasi residual, dan analisis hanya mencakup satu negara dengan tiga variabel penjelas. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan data kuartalan atau data panel, ukuran tata kelola alternatif, variabel kontrol tambahan seperti inflasi dan ekspor, serta metode non-linear seperti NARDL atau model *threshold*.

REFERENSI

Al-Saati, A. R. A. H. (1996). Public debt and public qirad: Their impacts on welfare. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics, 8*(1), 3–21.

Asteriou, D., Pilbeam, K., & Pratiwi, C. E. (2021). Public debt and economic growth: Panel data evidence for Asian countries. *Journal of Economics and Finance, 45*(2), 270–287. doi:10.1007/s12197-020-09515-7

Barro, R. J., & Sala-i-Martin, X. (2004). *Economic growth* (2nd ed.). MIT Press.

Brown, R. L., Durbin, J., & Evans, J. M. (1975). Techniques for testing the constancy of regression

relationships over time. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological), 37*(2), 149–163. doi:10.1111/j.2517-6161.1975.tb01532.x

Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. The Islamic Foundation.

Chapra, M. U. (2008). *The Islamic vision of development in the light of maqasid al-Shariah*. Islamic Research and Training Institute.

Gründler, K., & Potrafke, N. (2019). Corruption and economic growth: New empirical evidence. *European Journal of Political Economy, 60*, 101810. doi:10.1016/j.ejpoleco.2019.08.001

Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic econometrics* (5th ed.). McGraw-Hill/Irwin.

Hassan, A. A. (2026, October 15). Singapore air quality to remain unhealthy, may reach very unhealthy on Friday. *Bernama*.

Ibn Khaldun. (1967). *The Muqaddimah: An introduction to history* (F. Rosenthal, Trans.; N. J. Dawood, Ed.). Princeton University Press.

Ibrahim, C. (2020). Corruption, public debt and economic growth: Evidence from developing countries. *International Journal of Development Issues, 20*(1), 24–37. doi:10.1108/IJDI-12-2019-0208

Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2011). The Worldwide Governance Indicators: Methodology and analytical issues. *Hague Journal on the Rule of Law, 3*(2), 220–246. doi:10.1017/S1876404511200046

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2026, January 15). *Realisasi investasi 2025 lampaui target, hilirisasi melompat 43,3 persen*.

Kontan.co.id. (2026, February 13). *Posisi utang pemerintah Indonesia tembus Rp9.637 triliun, rasio terhadap PDB 40,46%.*

Kontan.co.id. (2026, October 9). *Pembayaran bunga utang pemerintah capai Rp444,5 triliun hingga September 2026*.

Krugman, P. (1988). Financing vs. forgiving a debt overhang. *Journal of Development Economics, 29*(3), 253–268. doi:10.1016/0304-3878(88)90044-2

Lainufar, I. R. (2026, October 15). Malaysia ajak negara ASEAN protes ke Indonesia soal kabut asap, usulkan tekanan finansial. *Kompas.com*.

Law, S. H., Ng, C. H., Kutan, A. M., & Law, Z. K. (2021). Public debt and economic growth in developing countries: Nonlinearity and threshold analysis. *Economic Modelling, 98*, 26–40. doi:10.1016/j.econmod.2021.02.004

Mauro, P. (1995). Corruption and growth. *The Quarterly Journal of Economics, 110*(3), 681–712.

Méon, P.-G., & Weill, L. (2010). Is corruption an efficient grease? *World Development, 38*(3), 244–259. doi:10.1016/j.worlddev.2009.06.004

Mhlaba, N., & Phiri, A. (2019). Is public debt harmful towards economic growth? New evidence from South Africa. *Cogent Economics & Finance, 7*(1), 1603653. doi:10.1080/23322039.2019.1603653

Muhamad, N. (2026, October 16). Terancam jadi "standalone market", IHSG anjlok 11% (Jumat, 16 Oktober 2026). *Databoks*.

Narayan, P. K. (2005). The saving and investment nexus for China: Evidence from cointegration tests. *Applied Economics, 37*(17), 1979–1990. doi:10.1080/00036840500278103

Onafowora, O., & Owoye, O. (2019). Public debt, foreign direct investment and economic growth dynamics: Empirical evidence from the Caribbean. *International Journal of Emerging Markets, 14*(5), 769–791. doi:10.1108/IJOEM-01-2018-0050

Paramahamsa, I. P. G. R., & Puspa, A. W. (2026, October 16). MSCI wacanakan standalone market, IHSG anjlok terdalam sejak 1998. *Bisnis.com*.

Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. *Journal of Applied Econometrics, 16*(3), 289–326. doi:10.1002/jae.616

Reinhart, C. M., & Rogoff, K. S. (2010). Growth in a time of debt. *American Economic Review, 100*(2), 573–578. doi:10.1257/aer.100.2.573

Ria, N., Musthofa, U. H., & Kurniati, E. (2026). The impact of foreign direct investment, exports, and the corruption perception index on ASEAN economic growth from an Islamic economic perspective. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 11*(1), 48–70. doi:10.47435/adz-dzahab.v11i1.4461

Rose-Ackerman, S., & Palifka, B. J. (2016). *Corruption and government: Causes, consequences, and reform* (2nd ed.). Cambridge University Press.

Setyowati, D. (2026, October 15). Korupsi dana darurat bencana BNPB diduga sejak 2022, ini temuan KPK. *Katadata.co.id*.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic development* (13th ed.). Pearson.

Transparency International Indonesia. (2026, February 10). *Indeks Persepsi Korupsi 2025: Penurunan kebebasan sipil & akses pada keadilan mengancam perjuangan melawan korupsi*.

Winduajie, Y. (2026, October 16). KPK: Adik eks Kepala BNPB dan 4 tersangka lain korupsi dana banjir Sumatra hingga karhutla. *iNews.id*.

World Bank. (2026). *World Development Indicators* [Data set]. World Bank.